

ANALISIS PENYERTAAN PEMILIK KAPAL DALAM KASUS PERIKANAN ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERIKANAN

Stanley Brilyan Soedjono

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah lautan mencapai 70% dari total wilayah menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perikanan ilegal. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023, Indonesia mengalami kerugian sebesar 23 miliar Dolar Amerika Serikat akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal. Salah satu tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia adalah kasus penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang menurut Undang-Undang Perikanan oleh KM. SLFA 4654 yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan tindak pidana perikanan ilegal ditinjau dari UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum terkait tanggung jawab AW sebagai pemilik kapal terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh RS sebagai Nakhoda yang dipekerjakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa AW sebagai pemilik kapal KM. SLFA 4654 dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai *uitlokker* berdasarkan Pasal 85 UU Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP karena terbukti menyuruh RS yang bekerja sebagai nakhoda untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang di wilayah perairan Indonesia. AW sebagai pemilik Kapal Motor SLFA 4654 dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan tindak pidana perikanan ilegal karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai penganjur (*uitlokker*) sesuai Pasal 85 UU Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan; Pertanggungjawaban Pidana; Penyertaan

ANALYSIS OF VESSEL OWNER'S CRIME PARTICIPATION IN ILLEGAL FISHING CASE REVIEWED FROM THE FISHERIES LAW

Stanley Brilyan Soedjono

Faculty of Legal Science of Law, University of Surabaya

Advisor:

- 1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.*
- 2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*

ABSTRACT

As a maritime country with an ocean area of 70% of the territory, Indonesia faces serious challenges related to illegal fisheries crime. Based on data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2023, Indonesia suffered a loss of 23 billion US Dollars due to illegal fishing activities. One of the fisheries crimes that occurred in Indonesia is the case of fishing using prohibited tools according to the Fisheries Law by KM. SLFA 4654 which can be subject to criminal liability in the participation of illegal fisheries crime in terms of Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. This research aims to analyze the legal aspects related to the responsibility of AW as the ship owner for the criminal act of fisheries committed by RS as an employed skipper. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results found that AW as the owner of KM. SLFA 4654 can be subject to criminal liability as an uitlokker based on Article 85 of the Fisheries Law Jo. Article 55 paragraph (1) to 2 of the Criminal Code because it is proven that he ordered RS who worked as a skipper to conduct fishing using prohibited tools in Indonesian waters. AW as the owner of Motorboat SLFA 4654 can be subject to criminal liability in the participation of illegal fisheries crime because he has fulfilled the elements of criminal liability as an organizer (uitlokker) in accordance with Article 85 of the Fisheries Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) 2nd Criminal Code. Article 55 paragraph (1) 2 of the Criminal Code

Keywords: Fisheries Crime; Criminal Liability; Participation in Crime